

- enaschat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
 enanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H.,M.H
 edaktur : Agus Ngadino, S.H.,M.H
 Ketua : Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
 Sekretaris : 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D (UNSR)I
 enyunting Ahli : 2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (UNSR)I
 Mitra Bestari : 3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M.,Ph.D (UI)
 : 4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H (UMS)
 : 5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H.,M.H (UNHAS)
 Penyunting Pelaksana : 1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
 : 2. Ruben Achmad, S.H.,M.H
 : 3. Amrullah Arpan, S.H.,S.U
 : 4. H. Achmad Romson, S.H.,M.H.,LL.M
 : 5. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum
 : 6. Rosmala Polani, S.H.,M.H
 : 7. Syarifuddin Petanase, S.H.,M.H
 sekretariat : 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
 : 2. Yan Santana, A.Md.
 alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus
 Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32
 Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
 Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA

Adalah

*Hukum Adat yang dituliskan dan Berlaku di Wilayah Sumatera Selatan
Sebelum Zaman Hindia Belanda dan Zaman Kemerdekaan*

PENGANTAR REDAKSI iii

- Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif
 Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan
 Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan
 Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945
Oleh: Muhammad Syaifuddin 2825-2860

Parliamentary Threshold dalam Kaitannya dengan Sistem
 Keperintahan Indonesia
Oleh: Fahmi Yoesmar AR..... 2861-2879

 Gagasan Penyatuan Pengorganisasian Pengujian Peraturan
 Perundang-Undangan di Bawah Mahkamah Konstitusi
Oleh: Else Suhaimi..... 2881-2897

 The Evaluation of the Effectiveness of International
 Environmental Law With Reference to the Issue of Global
 Climate Change
Oleh: Mada Apriandi Zuhir..... 2899-2916

 Legal Policy of Bank Indonesia in the Monetary Stability
Oleh: Vegitya Ramadhani-Putri..... 2917-2952

 Problematika Penerapan Hukum Acara Perdata Barat di
 Lingkungan Peradilan Agama
Oleh: Abdullah Gofar 2953-2978

 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut
 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Oleh: Helmanida 2979-2997

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho-Nya Majalah Simbur Cahaya edisi 47 ini dapat terbit. Dalam hal penyuntingan, penampilan, gaya penulisan dan substansi edisi kali ini mengikuti apa yang ada dalam edisi 46. Hal ini terkait dengan penyesuaian ketentuan akreditasi berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan adanya perubahan pengurusan majalah Simbur Cahaya.

Artikel ilmiah yang dimuat juga memperlihatkan adanya variasi pendekatan dalam memahami permasalahan hukum. Berbagai upaya dilakukan oleh penyunting untuk dapat menampilkan tulisan yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui koreksi, sehingga apa yang tersaji diharapkan dapat memenuhi harapan para pembaca yang budiman.

Pada edisi ini kajian diawali dengan menampilkan hasil pembahasan tentang: Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 **Oleh: Muhammad Syaifuddin. Parliamentary Threshold'** dalam Kaitannya dengan Sistem Kepartaian Indonesia **Oleh: Fahmi Yoesmar.** Gagasan Penyatuan Pengorganisasian Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Mahkamah Konstitusi **Oleh: Else Suhaimi.** The Evaluation of the Effectiveness of International Environmental Law With Reference to the Issue of Global Climate Change **Oleh: Mada Apriani Zuhir.** Legal Policy of Bank Indonesia in the Monetary Stability **Oleh: Vegitya Ramadhani Putri.** Problematika Penerapan Hukum Acara Perdata Barat di Lingkungan Peradilan Agama **Oleh: Abdullah Gofar.** Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah **Oleh: Helmanida.** Larangan Praktik Monopoli Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen **Oleh: Putu Samawati** Pemberantasan *extraordinary crime* korupsi Dalam perspektif hukum internasional **Oleh: Syahmin AK.** Hak Asasi Manusia (Kajian Kritis Dalam Perspektif Islam) **Oleh: Rasyid Ariman.** Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Tinjauan Normatif terhadap Undang-undang No 8 Tahun 2010) **Oleh: Vera Novianti.**